

Analisis Kegiatan Koreksi dan Validasi terhadap keputusan persetujuan pendaftaran tenaga Kerja di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Juanda

Awaliya Rahmadhani Syafitra¹, Yanda Bara Kusuma,S.AB.,M.AB²

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Jl. Rungkut Madya No.1, Gn.Anyar, Kec. Gn. Anyar, Surabaya, Jawa Timur, 60294

Email : 21042010015@student.upnjatim.ac.id

Abstract

This research is conducted to understand how the Analysis of Correction and Validation Activities influences the decision for the approval of employee registration at BPJS Employment. The type of research employed is a qualitative research method. The research technique involves interviewing staff at the Juanda branch of BPJS Employment. The results of this study indicate that the correction and validation process of labor data significantly impacts the performance of the BPJS Employment company. Correction and validation activities for labor data are carried out in small, medium, and large-scale companies. It is crucial to enhance these correction and validation activities to ensure the efficient completion of the employee registration approval process.

Keywords: Correction, Validation, Labor, Registration Approval

Abstrak

Penelitian ini dilakukan guna mengetahui bagaimana Analisis Kegiatan Koreksi dan Validasi keputusan persetujuan pendaftaran tenaga Kerja pada BPJS Ketenagakerjaan. Jenis penelitian yang digunakan adalah dengan metode penelitian kualitatif. Teknik penelitian ini menggunakan tahap wawancara staff BPJS Ketenagakerjaan cabang juanda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa proses koreksi dan validasi data tenaga kerja sangat berpengaruh terhadap kinerja perusahaan BPJS Ketenagakerjaan. Kegiatan koreksi dan validasi tenaga kerja dilakukan pada perusahaan yang berskala kecil, menengah dan besar. Kegiatan koreksi dan validasi tenaga kerja haruslah ditingkatkan agar proses persetujuan pendaftaran tenaga kerja dapat diselesaikan.

Kata Kunci : Koreksi, Validasi, Tenaga Kerja, Persetujuan pendaftaran

1. PENDAHULUAN

Seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat dan perkembangan sektor ketenagakerjaan di Indonesia, penting bagi setiap individu untuk memahami lebih dalam tentang sistem jaminan sosial ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan sebagai lembaga yang memiliki peran sentral dalam menyelenggarakan program-program ini, menjadi pilihan yang strategis untuk menjalani penelitian guna mendapatkan wawasan praktis dan pengalaman langsung di lapangan. Ketidakpastian ekonomi dan dinamika dunia kerja yang terus berubah menunjukkan perlunya pemahaman mendalam terkait perlindungan dan jaminan sosial bagi pekerja

BPJS Ketenagakerjaan adalah program jaminan sosial bagi Tenaga Kerja Indonesia (WNI) yang mana ditetapkan oleh pemerintah tujuannya yaitu melindungi seluruh tenaga kerja indonesia dalam mengatasi masalah serta resiko tentang hubungan kerja. BPJS Ketenagakerjaan bertindak sebagai program jaminan tenaga kerja di tempat kerja. Kewajiban

sebuah perusahaan dalam Mendaftarkan diri dan pekerja sebagai peserta di BPJS adalah langkah sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti. Pekerja berhak untuk mendaftarkan dirinya sebagai peserta program jaminan sosial di bawah tanggung jawab pemberi kerja, terutama jika pemberi kerja tidak mendaftarkan pekerjanya pada BPJS. Pengusaha yang memiliki 10 orang pekerja atau lebih, atau membayar upah setidaknya Rp 1 juta per bulan, diwajibkan mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program jaminan sosial tenaga kerja. Sanksi administratif akan diberlakukan bagi perusahaan non-penyelenggara negara yang tidak memenuhi kewajiban mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta BPJS.

Dasar hukum terkait BPJS Ketenagakerjaan dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Adapun Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993, yang mengatur Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, telah mengalami sejumlah perubahan, yang terakhir dilakukan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 mengaturlan Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara, dan juga kepada setiap individu, kecuali Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial. Keabsahan hukum ini dipertegas melalui keputusan Mahkamah Agung Nomor 82/PUU-X/2012.

Pada penelitian sebelumnya terdapat kurangnya informasi mengenai kegiatan koreksi dan validasi data selain itu penelitian sebelumnya kurang dalam menjelaskan pentingnya dan dampak dalam kegiatan koreksi dan validasi tenaga kerja. Sehingga pada penelitian ini peneliti akan menjelaskan dan memaparkan fungsi, manfaat, dampak dan tingkat efektivitas kegiatan koreksi data tenaga kerja terhadap keputusan persetujuan pendaftaran tenaga kerja.

Penelitian ini bertujuan untuk menggali pemahaman dan pendapat dari staff BPJS Ketenagakerjaan mengenai wajib koreksi dan validasi data tenaga kerja dalam melakukan pendaftaran tenaga kerja pada program BPJS Ketenagakerjaan. Melalui pendekatan kualitatif dan teknik wawancara mendalam, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai proses koreksi dan validasi data tenaga kerja terhadap keputusan persetujuan pendaftaran tenaga kerja. Apakah kegiatan Koreksi dan validasi data tenaga kerja pada BPJS Ketenagakerjaan sudah efektif.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah penelitian kualitatif. Dalam perspektif Creswell, J. W, penelitian kualitatif diartikan sebagai jenis penelitian yang difokuskan pada pemeriksaan isu-isu manusia dan sosial. Peneliti akan melaporkan hasil penelitian berdasarkan pandangan dan analisis data yang diperoleh secara langsung di lapangan, kemudian dijelaskan secara rinci dalam laporan penelitian.

Studi ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan konsentrasi pada teknik wawancara mendalam terhadap staf dan karyawan BPJS Ketenagakerjaan. Pendekatan kualitatif ini dipilih untuk mendapatkan pemahaman mendalam mengenai proses koreksi dan validasi data tenaga kerja serta dampaknya terhadap keputusan persetujuan pendaftaran tenaga kerja.

Teknik pada penelitian ini menggunakan tahap yaitu wawancara secara mendalam. Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif analisis dan memaparkan data dari pengamatan lapangan. Selain itu data yang sudah terkumpul akan dianalisis kembali.

Penelitian ini melibatkan karyawan atau staff BPJS Ketenagakerjaan yang sudah bekerja serta mengetahui proses alur dalam koreksi dan validasi data Tenaga Kerja terhadap keputusan persetujuan pendaftaran tenaga kerja. Selain itu penelitian ini akan menganalisis apakah kegiatan koreksi dan validasi pada BPJS Ketenagakerjaan cabang Juanda apakah sudah efektif dan efisien.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dalam kegiatan koreksi dan validasi data terhadap keputusan persetujuan pendaftaran pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Juanda maka diperoleh informasi melalui observasi dan wawancara dengan karyawan atau staff BPJS Ketenagakerjaan Cabang Juanda dengan hasil, Proses Mengoreksi dan validasi data peserta BPJS Ketenagakerjaan dengan melengkapi email dan nomor telepon yang belum lengkap dari peserta tenaga kerja pada saat mendaftar. dalam melakukan sebuah kegiatan pasti membutuhkan prosedur dalam kegiatan koreksi dan validasi tenaga kerja hal ini dilakukan pada setiap harinya dikarenakan data akan bertambah dan diperbarui pada setiap harinya. Berikut ini prosedur dalam koreksi data tenaga kerja pada BPJS Ketenagakerjaan :

1. Pendaftaran Tenaga Kerja oleh perusahaan
2. Proses Pengecekan dan pencarian data oleh kantor wilayah BPJS Ketenagakerjaan
3. Koreksi dan validasi data berdasarkan hasil pencarian kantor wilayah BPJS Ketenagakerjaan
4. Proses validasi oleh kepala kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan
5. Pengecekan kembali oleh kantor wilayah BPJS Ketenagakerjaan
6. Pendaftaran tenaga kerja disetujui

Peneliti melakukan wawancara kepada para staff atau karyawan BPJS Ketenagakerjaan terutama kepada bidang Kepesertaan dengan mengajukan berbagai pertanyaan. Dan hasil dari wawancara akan mendapatkan hasil untuk dianalisis kembali oleh peneliti mengenai bagaimana kegiatan koreksi dan validasi data tenaga kerja terhadap keputusan persetujuan pendaftaran tenaga kerja.

Dalam kegiatan koreksi dan validasi data Tenaga Kerja untuk persetujuan pendaftaran yaitu pengisian nomer telfon, email dan nama ibu. Kegiatan koreksi dan validasi data dengan mengoreksi email dan nomer telfon sangat penting karena adanya kebutuhan penilaian perusahaan agar mencapai tingkat 100 persen selain itu bagi BPJS Ketenagakerjaan Nomer dan email yang valid dapat bermanfaat untuk mengirim pemberitahuan dan menginformasikan mengenai hal- hal yang memang diperlukan kepada tenaga kerja.

Dalam melakukan suatu kegiatan pastinya akan mengalami kendala dalam melaksanakan kegiatan begitu juga dalam melakukan kegiatan koreksi dan validasi data tenaga kerja yang dilakukan juga mengalami kendala yaitu butuhnya tenaga kerja yang dapat membantu kegiatan koreksi dan validasi data dikarenakan banyaknya data tenaga kerja yang harus melakukan tahap koreksi dan validasi tenaga kerja. Selain itu web SMILE yang

digunakan terkadang mengalami gangguan sehingga kegiatan koreksi dan validasi data tenaga kerja tertunda.

Menurut karyawan atau staff BPJS Ketenagakerjaan dalam efektivitasnya kegiatan koreksi dan validasi data tenaga kerja ini tidak cukup efektif dikarenakan butuhnya waktu dalam mengoreksi satu- satu tenaga kerja dalam satu perusahaan sedangkan data yang dibutuhkan untuk koreksi dan validasi akan bertambah dan berubah setiap harinya.

Dalam melakukan kegiatan koreksi dan validasi tenaga kerja para staff dan karyawan BPJS Ketenagakerjaan tidak melakukan perbedaan kegiatan koreksi dan validasi data ini dilakukan tanpa memandang perusahaan itu kecil, menengah ataupun perusahaan besar hal ini dikarenakan dengan tujuan awal dari BPJS Ketenagakerjaan ini sendiri dalam mensejahterakan semua tenaga kerja.

Dapat disimpulkan dari berbagai pendapat para staff dan karyawan bahwasanya kegiatan koreksi dan validasi data tenaga kerja pada BPJS Ketenagakerjaan cabang juanda tidak efektif dan efisien dikarenakan waktu yang digunakan dalam melakukan koreksi data tenaga kerja cukup lama, hal ini dikarenakan dalam proses koreksi dan validasi data tenaga kerja kegiatan ini dilakukan dengan cara satu persatu dalam mengoreksi dan memvalidasi tenaga kerja pada satu perusahaan sehingga hal ini sangat tidak efektif dan efisien. Selain itu kegiatan koreksi dan validasi data tenaga kerja tidak melihat dari mana perusahaan itu berasal ataupun sebesar apa perusahaan itu tetapi mereka melakukan kegiatan koreksi dan validasi tenaga kerja di semua perusahaan.

Selain itu apabila kegiatan ini tidak dilakukan memiliki dampak bagi perusahaan BPJS Ketenagakerjaan dan para tenaga kerja yang akan mendapatkan kerugian. Pada perusahaan hal ini berdampak pada penilaian yang mana perusahaan tidak akan mendapatkan penilaian 100 persen dan hal itu dapat mempengaruhi kinerja dan potensi sebuah perusahaan, selain itu BPJS Ketenagakerjaan juga akan sulit dalam mengirimkan pemberitahuan terbaru kepada para tenaga kerja dikarenakan kurangnya informasi atau komunikasi yang dapat dihubungi.

4. KESIMPULAN

Pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan oleh suatu perusahaan untuk tenaga kerjanya sangat diwajibkan, apabila suatu perusahaan tidak melakukan pendaftaran maka perusahaan tersebut akan mendapatkan sanksi jika perusahaan selain penyelenggara negara tidak melaksanakan kewajiban mendaftarkan pekerjanya sebagai Peserta kepada BPJS adalah sanksi administratif. Dasar hukum terkait BPJS Ketenagakerjaan dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Adapun Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993, yang mengatur Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, telah mengalami sejumlah perubahan, yang terakhir dilakukan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 mengaturlan Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara, dan juga kepada setiap individu, kecuali Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial. Keabsahan hukum ini dipertegas melalui keputusan Mahkamah Agung Nomor 82/PUU-X/2012.

Penelitian ini dilakukan pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Juanda dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada teknik wawancara mendalam kepada para staff dan karyawan BPJS Ketenagakerjaan. Pendekatan kualitatif ini digunakan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai proses koreksi dan validasi data tenaga kerja terhadap keputusan persetujuan pendaftaran tenaga kerja.

Dalam melakukan kegiatan koreksi dan validasi data memiliki proses dalam pengerjaannya yaitu prosedur dalam koreksi data tenaga kerja pada BPJS Ketenagakerjaan sebagai berikut :

1. Pendaftaran Tenaga Kerja oleh perusahaan.
2. Proses Pengecekan dan pencarian data oleh kantor wilayah BPJS Ketenagakerjaan.
3. Koreksi dan validasi data berdasarkan hasil pencarian kantor wilayah BPJS Ketenagakerjaan.
4. Proses validasi oleh kepala kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan.
5. Pengecekan kembali oleh kantor wilayah BPJS Ketenagakerjaan.
6. Pendaftaran tenaga kerja disetujui.

Hasil dari penelitian yang sudah dilakukan pada BPJS Ketenagakerjaan cabang juanda yaitu kegiatan koreksi dan validasi data tenaga kerja pada BPJS Ketenagakerjaan cabang juanda tidak efektif dan efisien dikarenakan waktu yang digunakan dalam melakukan koreksi data tenaga kerja cukup lama, hal ini dikarenakan dalam proses koreksi dan validasi data tenaga kerja kegiatan ini dilakukan dengan cara satu persatu dalam mengkoreksi dan memvalidasi tenaga kerja pada satu perusahaan.

Selain itu kegiatan koreksi dan validasi data tenaga kerja pada BPJS Ketenagakerjaan cabang Juanda tidak melihat atau memandang dari mana perusahaan itu berasal ataupun sebesar apa perusahaan itu tetapi mereka melakukan kegiatan koreksi dan validasi tenaga kerja di semua perusahaan. Saran untuk penelitian ini Sebaiknya peneliti mengikuti kegiatan secara maksimal dan banyak bertanya kepada karyawan atau staff BPJS Ketenagakerjaan dilapangan dan secara aktif dalam bekerja, Sebaiknya Kegiatan penelitian selanjutnya dapat dipersiapkan lebih jelas lagi, dan Perlu dilakukan evaluasi terhadap analisis sistem ataupun metode yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan cabang Juanda Jawa Timur agar dapat mengetahui metode yang paling baik.

REFERENSI

Alvira Natanshia, Y., Nurhayati, Y., Hukum, F., Islam Kalimantan MAB Jl Adhyaksa No, U., Miai, S., Banjarmasin Utara, K., Banjarmasin, K., Selatan, K., Brigjen Hasan Basri Komplek Polsek Banjarmasin Utara Jalur, J. H., & Kalimantan Selatan, P. (2021). *EFEKTIFITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINGGINYA ANGKA STUNTING DI KABUPATEN BARITO KUALA*.

analisis-ketenagakerjaan-kota-yogyakarta-tahun-2021-10651. (n.d.).

Ardan, M., Yunus, R., Guslan Haimin, F., Mutiara Mahakam Samarinda, S., & Kesehatan Pelabuhan Gorontalo, K. (2019). PENGARUH METODE BRAINSTORMING TERHADAP PENGETAHUAN DAN SIKAP TENAGA KERJA BONGKAR MUAT TENTANG HIV DAN AIDS DI PELABUHAN GORONTALO. In *Jurnal Ilmiah Kesehatan Diagnosis* (Vol. 14).

- Ardikabima, Y., & Nugroho, A. (n.d.). *KESADARAN HUKUM MITRA KERJA PERUSAHAAN TRANSPORTASI UMUM TERKAIT KEPESERTAAN MANDIRI BPJS KETENAGAKERJAAN (STUDI DI PT SELAMAT SUGENG RAHAYU)* (Vol. 7, Issue 1). <http://www.sumbergroupbus.com/travel-info>,
- Brahmana, H., Kuara, G., Martha Santoso Sunjoyo, A., & Irawan, A. (2011). KEPATUHAN HUKUM KONSULTAN PAJAK KOTA MEDAN TERHADAP KEWAJIBAN PENDAFTARAN BPJS KETENAGAKERJAAN: FAKTOR PENYEBAB DAN KONSEKUENSI HUKUM. In *Sei Putih Bar.Kec. Medan Petisah* (Issue 3). <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/search.htmlpada>
- Esthi, R. B., & Sukmawati, A. (2011). Sukmawati-Analisis Tingkat Penerapan Manajemen | 134. In *Jurnal Manajemen dan Organisasi: Vol. II* (Issue 2).
- Mamenun, M., Pawitan, H., & Sopaheluwakan, A. (2014). VALIDASI DAN KOREKSI DATA SATELIT TRMM PADA TIGA POLA HUJAN DI INDONESIA. *Jurnal Meteorologi Dan Geofisika*, 15(1). <https://doi.org/10.31172/jmg.v15i1.169>
- Nursanjaya, S., Ag, M., & Pd. (2021). *MEMAHAMI PROSEDUR PENELITIAN KUALITATIF: Panduan Praktis untuk Memudahkan Mahasiswa* (Vol. 04, Issue 01).
- Pawitan, H., & Sopaheluwakan, A. (n.d.). *VALIDASI DAN KOREKSI DATA SATELIT TRMM PADA TIGA POLA HUJAN DI INDONESIA VALIDATION AND CORRECTION OF TRMM SATELLITE DATA ON THREE RAINFALL PATTERNS IN INDONESIA.*
- PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA.* (n.d.).
- Rahma, D. (n.d.). *Dwi Rahma Account; Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Perbankan Halaman 1488* (Vol. 8, Issue 2).
- Randa Layuk, L., & Aplonia Lau, E. (n.d.). *ANALISIS KINERJA KEUANGAN BPJS KETENAGAKERJAAN.*